



BUPATI JEMBER
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN BUPATI JEMBER
NOMOR 56 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI JEMBER
NOMOR 36 TAHUN 2021 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEMBER,

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai tindak lanjut Instruksi Mendagri Nomor 17 tahun 2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro Dan Mengoptimalkan Posko Penanganan Corona Virus Disease 2019 Di Tingkat Desa Dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019;
 - b. **bahwa sebagai tindak lanjut Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2021 tentang Penyediaan dan Percepatan Penyaluran Bantuan Sosial dan/atau Jaring Pengaman Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah;**
 - c. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/ 379 /KPTS/013/2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Corona Virus Disease 2019 Di Jawa Timur;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, c, dan d perlu menetapkan Perubahan atas Peraturan Bupati Jember Nomor 36 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6041);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
 19. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan / atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);
 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
 22. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (berita negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);**
- 28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 581);**
- 29. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa TA 2021 Dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dan Dampaknya, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 94/PMK.07/2021 Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 825);**
30. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kabupaten Jember (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2009 Nomor 1);
31. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2021 Nomor 1);
32. Peraturan Bupati Jember Nomor 36 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Jember Tahun 2021 Nomor 36);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI JEMBER NOMOR 36 TAHUN 2021 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Jember Nomor 36 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Jember Tahun 2021 Nomor 36), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 18 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

- (1) Anggaran Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a direncanakan sebesar **Rp.3.175.716.327.141,00,-** (tiga triliun seratus tujuh puluh lima milyar tujuh ratus enam belas juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu seratus empat puluh satu rupiah) yang terdiri atas :
 - a. Belanja pegawai;
 - b. Belanja barang dan jasa;
 - c. Belanja bunga;
 - d. Belanja subsidi;
 - e. Belanja hibah; dan
 - f. Belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar **Rp. 1.700.855.548.404,00,-** (satu triliun tujuh ratus milyar delapan ratus lima puluh lima juta lima ratus empat puluh delapan ribu empat ratus empat rupiah).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar **Rp.1.337.542.593.027,00,-** (satu triliun tiga ratus tiga puluh tujuh milyar lima ratus empat puluh dua juta lima ratus sembilan puluh tiga ribu dua puluh tujuh rupiah).
- (4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 0,00 (nol rupiah).
- (5) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 3.782.839.000,00 (tiga milyar tujuh ratus delapan puluh dua juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah).
- (6) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 113.503.552.710,00 (seratus tiga belas milyar lima ratus tiga juta lima ratus lima puluh dua ribu tujuh ratus sepuluh rupiah).
- (7) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. **20.031.794.000,00** (dua puluh milyar tiga puluh satu juta tujuh ratus sembilan puluh empat ribu rupiah).

2. Ketentuan Pasal 20 ayat (1), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) diubah, sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

- (1) Anggaran Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b direncanakan sebesar **Rp.649.305.263.511,00,-** (Enam ratus empat puluh sembilan milyar tiga ratus lima juta dua ratus enam puluh tiga ribu lima ratus sebelas rupiah) yang terdiri atas :
 - a. Belanja Modal Tanah;
 - b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin;
 - c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan;
 - d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi; dan
 - e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya.
- (2) Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 3.199.581.317,00 (tiga milyar seratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus delapan puluh satu ribu tiga ratus tujuh belas rupiah).
- (3) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.**155.779.051.482,00,-** (Seratus lima puluh lima milyar tujuh ratus tujuh puluh sembilan juta lima puluh satu ribu empat ratus delapan puluh dua rupiah).
- (4) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar **Rp.62.072.411.314,00,-** (Enam puluh dua

milyar tujuh puluh dua juta empat ratus sebelas ribu tiga ratus empat belas rupiah).

- (5) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar **Rp.387.798.852.498,00,-** (Tiga ratus delapan puluh tujuh milyar tujuh ratus sembilan puluh delapan juta delapan ratus lima puluh dua ribu empat ratus sembilan puluh delapan rupiah).
- (6) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 40.455.366.900,00 (empat puluh milyar empat ratus lima puluh lima juta tiga ratus enam puluh enam ribu sembilan ratus rupiah).

3. Ketentuan Pasal 22 diubah, sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c direncanakan sebesar **Rp.98.810.565.754,00,-** (Sembilan puluh delapan milyar delapan ratus sepuluh juta lima ratus enam puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh empat rupiah).

4. Ketentuan lampiran I rincian Pasal 18, Pasal 20 dan Pasal 22 diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jember.

Ditetapkan di Jember
pada tanggal 19 Juli 2021

BUPATI JEMBER,

ttd

HENDY S

Diundangkan di Jember
pada tanggal 19 Juli 2021





PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
RINGKASAN PERGESERAN APBD BERDASARKAN RINCIAN OBYEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2021

| NOMOR URUT | URAIAN | JUMLAH (Rp) | | BERTAMBAH / (BERKURANG) | | DASAR HUKUM |
|--------------|---|----------------------|----------------------|-------------------------|------|-------------|
| | | SEBELUM PERGESERAN | SETELAH PERGESERAN | (Rp) | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 4 - 3 | 6 | 7 |
| 4 | PENDAPATAN DAERAH | 3.708.355.831.232,00 | 3.708.355.831.232,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4.1 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 716.851.235.600,00 | 716.851.235.600,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4.1.01 | Pajak Daerah | 223.415.500.000,00 | 223.415.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4.1.01.06 | Pajak Hotel | 3.750.200.000,00 | 3.750.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4.1.01.06.01 | Pajak Hotel | 3.714.200.000,00 | 3.714.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4.1.01.06.06 | Pajak Pesanggrahan | 36.000.000,00 | 36.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4.1.01.07 | Pajak Restoran | 18.212.000.000,00 | 18.212.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4.1.01.07.01 | Pajak Restoran dan Sejenisnya | 8.832.000.000,00 | 8.832.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4.1.01.07.02 | Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya | 5.600.000.000,00 | 5.600.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4.1.01.07.03 | Pajak Kafetaria dan Sejenisnya | 1.180.000.000,00 | 1.180.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4.1.01.07.07 | Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya | 2.600.000.000,00 | 2.600.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4.1.01.08 | Pajak Hiburan | 2.330.300.000,00 | 2.330.300.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4.1.01.08.01 | Pajak Tontonan Film | 1.216.000.000,00 | 1.216.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4.1.01.08.05 | Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya | 220.000.000,00 | 220.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4.1.01.08.08 | Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan | 816.000.000,00 | 816.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4.1.01.08.09 | Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat Kebugaran (Fitness Center) | 27.900.000,00 | 27.900.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4.1.01.08.10 | Pajak Pertandingan Olahraga | 50.400.000,00 | 50.400.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4.1.01.09 | Pajak Reklame | 6.364.628.000,00 | 6.364.628.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4.1.01.09.01 | Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron | 5.366.628.000,00 | 5.366.628.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4.1.01.09.02 | Pajak Reklame Kain | 860.000.000,00 | 860.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4.1.01.09.04 | Pajak Reklame Selebaran | 98.000.000,00 | 98.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4.1.01.09.05 | Pajak Reklame Berjalan | 40.000.000,00 | 40.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4.1.01.10 | Pajak Penerangan Jalan | 71.150.000.000,00 | 71.150.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4.1.01.10.01 | Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri | 150.000.000,00 | 150.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4.1.01.10.02 | Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain | 71.000.000.000,00 | 71.000.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4.1.01.11 | Pajak Parkir | 1.500.000.000,00 | 1.500.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |

| NOMOR URUT | URAIAN | JUMLAH (Rp) | | BERTAMBAH / (BERKURANG) | | DASAR HUKUM |
|--------------|---|--------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------|-------------|
| | | SEBELUM PERGESERAN | SETELAH PERGESERAN | (Rp) | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 4 - 3 | 6 | 7 |
| 4.1.01.11.01 | Pajak Parkir | 1.500.000.000,00 | 1.500.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4.1.01.12 | Pajak Air Tanah | 550.000.000,00 | 550.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4.1.01.12.01 | Pajak Air Tanah | 550.000.000,00 | 550.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4.1.01.14 | Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan | 1.600.000.000,00 | 1.600.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4.1.01.14.37 | Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya | 1.600.000.000,00 | 1.600.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4.1.01.15 | Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) | 74.000.000.000,00 | 74.000.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4.1.01.15.01 | PBBP2 | 74.000.000.000,00 | 74.000.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4.1.01.16 | Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) | 43.958.372.000,00 | 43.958.372.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4.1.01.16.01 | BPHTB-Pemindahan Hak | 43.958.372.000,00 | 43.958.372.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4.1.02 | Retribusi Daerah | 42.203.813.283,00 | 42.203.813.283,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4.1.02.01 | Retribusi Jasa Umum | 34.988.217.852,00 | 34.988.217.852,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4.1.02.01.01 | Retribusi Pelayanan Kesehatan | 16.240.261.852,00 | 16.240.261.852,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4.1.02.01.02 | Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan | 114.200.000,00 | 114.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4.1.02.01.03 | Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat | 6.000.000,00 | 6.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4.1.02.01.04 | Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum | 11.343.781.000,00 | 11.343.781.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4.1.02.01.05 | Retribusi Pelayanan Pasar | 5.997.115.000,00 | 5.997.115.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4.1.02.01.06 | Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor | 1.123.860.000,00 | 1.123.860.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4.1.02.01.07 | Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4.1.02.01.09 | Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus | 161.000.000,00 | 161.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4.1.02.02 | Retribusi Jasa Usaha | 4.929.695.431,00 | 4.929.695.431,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4.1.02.02.01 | Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah | 1.070.559.431,00 | 1.070.559.431,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4.1.02.02.02 | Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan | 34.560.000,00 | 34.560.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4.1.02.02.04 | Retribusi Terminal | 48.526.000,00 | 48.526.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4.1.02.02.05 | Retribusi Tempat Khusus Parkir | 362.900.000,00 | 362.900.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4.1.02.02.06 | Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila | 1.027.000.000,00 | 1.027.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4.1.02.02.07 | Retribusi Rumah Potong Hewan | 157.500.000,00 | 157.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4.1.02.02.09 | Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga | 1.947.150.000,00 | 1.947.150.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4.1.02.02.11 | Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah | 281.500.000,00 | 281.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4.1.02.03 | Retribusi Perizinan Tertentu | 2.285.900.000,00 | 2.285.900.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4.1.02.03.01 | Retribusi Izin Mendirikan Bangunan | 2.000.000.000,00 | 2.000.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4.1.02.03.03 | Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum | 20.900.000,00 | 20.900.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4.1.02.03.04 | Retribusi Izin Usaha Perikanan | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4.1.02.03.05 | Retribusi Pengendalian Lalu Lintas | 250.000.000,00 | 250.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |

| NOMOR URUT | URAIAN | JUMLAH (Rp) | | BERTAMBAH / (BERKURANG) | | DASAR HUKUM |
|--------------|--|----------------------|----------------------|-------------------------|------|-------------|
| | | SEBELUM PERGESERAN | SETELAH PERGESERAN | (Rp) | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 4 - 3 | 6 | 7 |
| 4.1.03 | Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | 6.102.248.169,00 | 6.102.248.169,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4.1.03.01 | Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMN | 1.000.000.000,00 | 1.000.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4.1.03.01.01 | Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMN | 1.000.000.000,00 | 1.000.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4.1.03.02 | Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD | 5.102.248.169,00 | 5.102.248.169,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4.1.03.02.01 | Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan) | 5.102.248.169,00 | 5.102.248.169,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4.1.04 | Lain-lain PAD yang Sah | 445.129.674.148,00 | 445.129.674.148,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4.1.04.01 | Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan | 45.000.000,00 | 45.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4.1.04.01.05 | Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya | 45.000.000,00 | 45.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4.1.04.03 | Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan | 694.860.000,00 | 694.860.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4.1.04.03.01 | Hasil Sewa BMD | 384.860.000,00 | 384.860.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4.1.04.03.02 | Hasil Kerja Sama Pemanfaatan BMD | 310.000.000,00 | 310.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4.1.04.05 | Jasa Giro | 17.500.000.000,00 | 17.500.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4.1.04.05.01 | Jasa Giro pada Kas Daerah | 17.500.000.000,00 | 17.500.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4.1.04.07 | Pendapatan Bunga | 15.000.000.000,00 | 15.000.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4.1.04.07.01 | Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah | 15.000.000.000,00 | 15.000.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4.1.04.09 | Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain | 65.880.000,00 | 65.880.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4.1.04.09.01 | Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain | 65.880.000,00 | 65.880.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4.1.04.13 | Pendapatan Denda Retribusi Daerah | 3.720.000,00 | 3.720.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4.1.04.13.02 | Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha | 3.720.000,00 | 3.720.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4.1.04.15 | Pendapatan dari Pengembalian | 12.100.000.000,00 | 12.100.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4.1.04.15.01 | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 21 | 12.100.000.000,00 | 12.100.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4.1.04.16 | Pendapatan BLUD | 301.001.166.000,00 | 301.001.166.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4.1.04.16.01 | Pendapatan BLUD | 301.001.166.000,00 | 301.001.166.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4.1.04.18 | Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) | 98.719.048.148,00 | 98.719.048.148,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4.1.04.18.01 | Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP | 98.719.048.148,00 | 98.719.048.148,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4.2 | PENDAPATAN TRANSFER | 2.789.272.095.632,00 | 2.789.272.095.632,00 | 0,00 | 0,00 | |

| NOMOR URUT | URAIAN | JUMLAH (Rp) | | BERTAMBAH / (BERKURANG) | | DASAR HUKUM |
|--------------|--|----------------------|----------------------|-------------------------|--------|-------------|
| | | SEBELUM PERGESERAN | SETELAH PERGESERAN | (Rp) | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 4 - 3 | 6 | 7 |
| 4.2.01 | Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat | 2.569.367.291.793,00 | 2.569.367.291.793,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4.2.01.01 | Dana Perimbangan | 2.256.944.383.793,00 | 2.256.944.383.793,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4.2.01.01.01 | Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) | 149.808.366.793,00 | 149.808.366.793,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4.2.01.01.02 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU) | 1.607.489.075.000,00 | 1.607.489.075.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4.2.01.01.03 | Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik | 97.320.963.000,00 | 97.320.963.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4.2.01.01.04 | Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik | 402.325.979.000,00 | 402.325.979.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4.2.01.05 | Dana Desa | 312.422.908.000,00 | 312.422.908.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4.2.01.05.01 | Dana Desa | 312.422.908.000,00 | 312.422.908.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4.2.02 | Pendapatan Transfer Antar Daerah | 219.904.803.839,00 | 219.904.803.839,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4.2.02.01 | Pendapatan Bagi Hasil | 203.510.251.982,00 | 203.510.251.982,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4.2.02.01.01 | Pendapatan Bagi Hasil Pajak | 203.510.251.982,00 | 203.510.251.982,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4.2.02.02 | Bantuan Keuangan | 16.394.551.857,00 | 16.394.551.857,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4.2.02.02.02 | Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi | 16.394.551.857,00 | 16.394.551.857,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4.3 | LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH | 202.232.500.000,00 | 202.232.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4.3.01 | Pendapatan Hibah | 20.317.460.000,00 | 20.317.460.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4.3.01.01 | Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat | 20.317.460.000,00 | 20.317.460.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4.3.01.01.01 | Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat | 20.317.460.000,00 | 20.317.460.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4.3.03 | Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan | 181.915.040.000,00 | 181.915.040.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4.3.03.01 | Lain-lain Pendapatan | 181.915.040.000,00 | 181.915.040.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4.3.03.01.01 | Pendapatan Hibah Dana BOS | 181.915.040.000,00 | 181.915.040.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5 | BELANJA DAERAH | 4.448.913.815.154,00 | 4.448.913.815.154,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | 3.221.504.520.374,00 | 3.175.716.327.141,00 | (45.788.193.233,00) | (1,42) | |
| 5.1.01 | Belanja Pegawai | 1.685.673.981.932,00 | 1.700.855.548.404,00 | 15.181.566.472,00 | 0,90 | |
| 5.1.01.01 | Belanja Gaji dan Tunjangan ASN | 957.727.678.379,00 | 957.261.677.391,00 | (466.000.988,00) | (0,05) | |
| 5.1.01.01.01 | Belanja Gaji Pokok ASN | 729.900.631.836,00 | 729.455.164.692,00 | (445.467.144,00) | (0,06) | |
| 5.1.01.01.02 | Belanja Tunjangan Keluarga ASN | 75.403.708.082,00 | 75.360.280.130,00 | (43.427.952,00) | (0,06) | |
| 5.1.01.01.03 | Belanja Tunjangan Jabatan ASN | 10.175.724.862,00 | 9.497.960.677,00 | (677.764.185,00) | (6,66) | |
| 5.1.01.01.04 | Belanja Tunjangan Fungsional ASN | 41.335.185.321,00 | 41.380.711.821,00 | 45.526.500,00 | 0,11 | |
| 5.1.01.01.05 | Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN | 18.796.792.585,00 | 19.416.369.998,00 | 619.577.413,00 | 3,30 | |

| NOMOR URUT | URAIAN | JUMLAH (Rp) | | BERTAMBAH / (BERKURANG) | | DASAR HUKUM |
|--------------|--|--------------------|--------------------|-------------------------|---------|-------------|
| | | SEBELUM PERGESERAN | SETELAH PERGESERAN | (Rp) | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 4 - 3 | 6 | 7 |
| 5.1.01.01.06 | Belanja Tunjangan Beras ASN | 41.441.701.433,00 | 41.477.229.489,00 | 35.528.056,00 | 0,09 | |
| 5.1.01.01.07 | Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN | 1.521.475.035,00 | 1.521.475.035,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5.1.01.01.08 | Belanja Pembulatan Gaji ASN | 19.957.268,00 | 19.983.592,00 | 26.324,00 | 0,13 | |
| 5.1.01.01.09 | Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN | 31.197.798.450,00 | 31.197.798.450,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5.1.01.01.10 | Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN | 1.997.780.409,00 | 1.997.780.409,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5.1.01.01.11 | Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN | 5.936.923.098,00 | 5.936.923.098,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5.1.01.02 | Belanja Tambahan Penghasilan ASN | 208.901.017.798,00 | 208.851.807.798,00 | (49.210.000,00) | (0,02) | |
| 5.1.01.02.01 | Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN | 89.175.832.473,00 | 89.156.148.473,00 | (19.684.000,00) | (0,02) | |
| 5.1.01.02.04 | Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN | 23.940.000,00 | 23.940.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5.1.01.02.05 | Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN | 119.701.245.325,00 | 119.671.719.325,00 | (29.526.000,00) | (0,02) | |
| 5.1.01.03 | Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN | 385.737.977.709,00 | 401.434.755.169,00 | 15.696.777.460,00 | 4,07 | |
| 5.1.01.03.01 | Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah | 7.246.710.601,00 | 7.243.110.601,00 | (3.600.000,00) | (0,05) | |
| 5.1.01.03.02 | Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah | 1.946.614.361,00 | 1.708.845.721,00 | (237.768.640,00) | (12,21) | |
| 5.1.01.03.03 | Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD | 290.084.216.004,00 | 290.084.216.004,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5.1.01.03.06 | Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN | 68.963.574.743,00 | 85.655.520.843,00 | 16.691.946.100,00 | 24,20 | |
| 5.1.01.03.07 | Belanja Honorarium | 17.496.862.000,00 | 16.743.062.000,00 | (753.800.000,00) | (4,31) | |
| 5.1.01.04 | Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD | 30.981.753.847,00 | 30.981.753.847,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5.1.01.04.01 | Belanja Uang Representasi DPRD | 1.120.000.000,00 | 1.120.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5.1.01.04.02 | Belanja Tunjangan Keluarga DPRD | 159.811.960,00 | 159.811.960,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5.1.01.04.03 | Belanja Tunjangan Beras DPRD | 193.192.368,00 | 193.192.368,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5.1.01.04.04 | Belanja Uang Paket DPRD | 112.000.000,00 | 112.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5.1.01.04.05 | Belanja Tunjangan Jabatan DPRD | 1.680.040.600,00 | 1.680.040.600,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5.1.01.04.06 | Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD | 168.000.000,00 | 168.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5.1.01.04.07 | Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD | 101.400.000,00 | 101.400.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5.1.01.04.08 | Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD | 8.190.000.000,00 | 8.190.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5.1.01.04.09 | Belanja Tunjangan Reses DPRD | 2.205.000.000,00 | 2.205.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5.1.01.04.10 | Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD | 14.350.839,00 | 14.350.839,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5.1.01.04.12 | Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD | 10.744.783.080,00 | 10.744.783.080,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5.1.01.04.13 | Belanja Tunjangan Transportasi DPRD | 6.279.000.000,00 | 6.279.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5.1.01.04.14 | Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD | 14.175.000,00 | 14.175.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5.1.01.05 | Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH | 1.009.599.499,00 | 1.009.599.499,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5.1.01.05.01 | Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH | 122.850.000,00 | 122.850.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5.1.01.05.02 | Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH | 12.285.000,00 | 12.285.000,00 | 0,00 | 0,00 | |

| NOMOR URUT | URAIAN | JUMLAH (Rp) | | BERTAMBAH / (BERKURANG) | | DASAR HUKUM |
|--------------|--|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------|---------------|-------------|
| | | SEBELUM PERGESERAN | SETELAH PERGESERAN | (Rp) | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 4 - 3 | 6 | 7 |
| 5.1.01.05.03 | Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH | 221.130.000,00 | 221.130.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5.1.01.05.04 | Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH | 18.249.840,00 | 18.249.840,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5.1.01.05.05 | Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH | 632.800,00 | 632.800,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5.1.01.05.06 | Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH | 2.520,00 | 2.520,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5.1.01.05.10 | Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah | 634.449.339,00 | 634.449.339,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5.1.01.06 | Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH | 1.496.700.000,00 | 1.496.700.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5.1.01.06.01 | Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD | 371.700.000,00 | 371.700.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5.1.01.06.02 | Belanja Dana Operasional KDH/WKDH | 1.125.000.000,00 | 1.125.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5.1.01.88 | Belanja Pegawai BOS | 37.144.661.500,00 | 37.144.661.500,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5.1.01.88.88 | Belanja Pegawai BOS | 37.144.661.500,00 | 37.144.661.500,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5.1.01.99 | Belanja Pegawai BLUD | 62.674.593.200,00 | 62.674.593.200,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5.1.01.99.99 | Belanja Pegawai BLUD | 62.674.593.200,00 | 62.674.593.200,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 1.390.344.352.732,00 | 1.337.542.593.027,00 | (52.801.759.705,00) | (3,80) | |
| 5.1.02.01 | Belanja Barang | 290.702.895.435,00 | 218.258.486.310,00 | (72.444.409.125,00) | (24,92) | |
| 5.1.02.01.01 | Belanja Barang Pakai Habis | 290.666.432.935,00 | 218.222.023.810,00 | (72.444.409.125,00) | (24,92) | |
| 5.1.02.01.02 | Belanja Barang Tak Habis Pakai | 36.462.500,00 | 36.462.500,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5.1.02.02 | Belanja Jasa | 573.317.617.299,00 | 602.613.927.534,00 | 29.296.310.235,00 | 5,11 | |
| 5.1.02.02.01 | Belanja Jasa Kantor | 395.796.294.864,00 | 441.395.401.785,00 | 45.599.106.921,00 | 11,52 | |
| 5.1.02.02.02 | Belanja Iuran Jaminan/Asuransi | 71.807.254.442,00 | 62.547.943.442,00 | (9.259.311.000,00) | (12,89) | |
| 5.1.02.02.03 | Belanja Sewa Tanah | 7.001.160.272,00 | 7.001.160.272,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5.1.02.02.04 | Belanja Sewa Peralatan dan Mesin | 9.609.022.400,00 | 8.300.750.400,00 | (1.308.272.000,00) | (13,62) | |
| 5.1.02.02.05 | Belanja Sewa Gedung dan Bangunan | 1.503.275.000,00 | 1.900.759.000,00 | 397.484.000,00 | 26,44 | |
| 5.1.02.02.06 | Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi | 115.000.000,00 | 115.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5.1.02.02.08 | Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi | 41.620.630.633,00 | 38.903.323.633,00 | (2.717.307.000,00) | (6,53) | |
| 5.1.02.02.09 | Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi | 38.878.989.204,00 | 34.588.466.518,00 | (4.290.522.686,00) | (11,04) | |
| 5.1.02.02.12 | Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan | 6.946.337.400,00 | 7.821.469.400,00 | 875.132.000,00 | 12,60 | |
| 5.1.02.02.13 | Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah | 39.653.084,00 | 39.653.084,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5.1.02.03 | Belanja Pemeliharaan | 69.565.544.227,00 | 65.621.017.747,00 | (3.944.526.480,00) | (5,67) | |
| 5.1.02.03.01 | Belanja Pemeliharaan Tanah | 1.950.789.600,00 | 1.753.264.800,00 | (197.524.800,00) | (10,13) | |
| 5.1.02.03.02 | Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin | 12.067.307.350,00 | 11.958.674.350,00 | (108.633.000,00) | (0,90) | |
| 5.1.02.03.03 | Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan | 43.409.267.484,00 | 39.770.898.804,00 | (3.638.368.680,00) | (8,38) | |
| 5.1.02.03.04 | Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi | 12.138.179.793,00 | 12.138.179.793,00 | 0,00 | 0,00 | |

| NOMOR URUT | URAIAN | JUMLAH (Rp) | | BERTAMBAH / (BERKURANG) | | DASAR HUKUM |
|--------------|--|--------------------|--------------------|-------------------------|---------|-------------|
| | | SEBELUM PERGESERAN | SETELAH PERGESERAN | (Rp) | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 4 - 3 | 6 | 7 |
| 5.1.02.04 | Belana Perjalanan Dinas | 109.172.106.871,00 | 103.762.972.536,00 | (5.409.134.335,00) | (4,95) | |
| 5.1.02.04.01 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri | 108.620.478.871,00 | 103.211.344.536,00 | (5.409.134.335,00) | (4,98) | |
| 5.1.02.04.02 | Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri | 551.628.000,00 | 551.628.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5.1.02.05 | Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat | 29.831.581.000,00 | 29.531.581.000,00 | (300.000.000,00) | (1,01) | |
| 5.1.02.05.01 | Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat | 24.796.250.000,00 | 24.796.250.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5.1.02.05.02 | Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat | 5.035.331.000,00 | 4.735.331.000,00 | (300.000.000,00) | (5,96) | |
| 5.1.02.88 | Belanja Barang dan Jasa BOS | 108.628.035.100,00 | 108.628.035.100,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5.1.02.88.88 | Belanja Barang dan Jasa BOS | 108.628.035.100,00 | 108.628.035.100,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5.1.02.99 | Belanja Barang dan Jasa BLUD | 209.126.572.800,00 | 209.126.572.800,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5.1.02.99.99 | Belanja Barang dan Jasa BLUD | 209.126.572.800,00 | 209.126.572.800,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5.1.04 | Belanja Subsidi | 3.782.839.000,00 | 3.782.839.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5.1.04.03 | Belanja Subsidi kepada Badan Usaha Milik Swasta | 3.782.839.000,00 | 3.782.839.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5.1.04.03.01 | Belanja Subsidi kepada Badan Usaha Milik Swasta | 3.782.839.000,00 | 3.782.839.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5.1.05 | Belanja Hibah | 113.503.552.710,00 | 113.503.552.710,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5.1.05.05 | Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia | 110.441.160.210,00 | 110.441.160.210,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5.1.05.05.01 | Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan | 67.750.120.210,00 | 67.750.120.210,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5.1.05.05.02 | Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar | 25.000.000.000,00 | 25.000.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5.1.05.05.03 | Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan | 17.691.040.000,00 | 17.691.040.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5.1.05.07 | Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik | 3.062.392.500,00 | 3.062.392.500,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5.1.05.07.01 | Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik | 3.062.392.500,00 | 3.062.392.500,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5.1.06 | Belanja Bantuan Sosial | 28.199.794.000,00 | 20.031.794.000,00 | (8.168.000.000,00) | (28,96) | |
| 5.1.06.01 | Belanja Bantuan Sosial kepada Individu | 215.000.000,00 | 215.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5.1.06.01.01 | Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu | 215.000.000,00 | 215.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5.1.06.03 | Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat | 27.984.794.000,00 | 19.816.794.000,00 | (8.168.000.000,00) | (29,19) | |

| NOMOR URUT | URAIAN | JUMLAH (Rp) | | BERTAMBAH / (BERKURANG) | | DASAR HUKUM |
|--------------|--|--------------------|--------------------|-------------------------|---------|-------------|
| | | SEBELUM PERGESERAN | SETELAH PERGESERAN | (Rp) | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 4 - 3 | 6 | 7 |
| 5.1.06.03.01 | Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat | 27.984.794.000,00 | 19.816.794.000,00 | (8.168.000.000,00) | (29,19) | |
| 5.2 | BELANJA MODAL | 681.326.250.275,00 | 649.305.263.511,00 | (32.020.986.764,00) | (4,70) | |
| 5.2.01 | Belanja Modal Tanah | 3.199.581.317,00 | 3.199.581.317,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5.2.01.01 | Belanja Modal Tanah | 3.199.581.317,00 | 3.199.581.317,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5.2.01.01.01 | Belanja Modal Tanah Persil | 1.281.037.000,00 | 1.281.037.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5.2.01.01.03 | Belanja Modal Lapangan | 1.918.544.317,00 | 1.918.544.317,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5.2.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 173.830.342.775,00 | 155.779.051.482,00 | (18.051.291.293,00) | (10,38) | |
| 5.2.02.01 | Belanja Modal Alat Besar | 4.653.632.464,00 | 10.893.724.464,00 | 6.240.092.000,00 | 134,09 | |
| 5.2.02.01.01 | Belanja Modal Alat Besar Darat | 4.456.614.000,00 | 10.696.706.000,00 | 6.240.092.000,00 | 140,02 | |
| 5.2.02.01.03 | Belanja Modal Alat Bantu | 197.018.464,00 | 197.018.464,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5.2.02.02 | Belanja Modal Alat Angkutan | 15.876.072.800,00 | 15.876.072.800,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5.2.02.02.01 | Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor | 15.551.259.300,00 | 15.551.259.300,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5.2.02.02.02 | Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor | 324.813.500,00 | 324.813.500,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5.2.02.03 | Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur | 826.005.250,00 | 816.091.000,00 | (9.914.250,00) | (1,20) | |
| 5.2.02.03.01 | Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin | 208.527.750,00 | 198.613.500,00 | (9.914.250,00) | (4,75) | |
| 5.2.02.03.02 | Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin | 25.249.500,00 | 25.249.500,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5.2.02.03.03 | Belanja Modal Alat Ukur | 592.228.000,00 | 592.228.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5.2.02.04 | Belanja Modal Alat Pertanian | 5.841.781.518,00 | 7.697.318.518,00 | 1.855.537.000,00 | 31,76 | |
| 5.2.02.04.01 | Belanja Modal Alat Pengolahan | 5.841.781.518,00 | 7.697.318.518,00 | 1.855.537.000,00 | 31,76 | |
| 5.2.02.05 | Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga | 14.064.734.443,00 | 11.832.163.800,00 | (2.232.570.643,00) | (15,87) | |
| 5.2.02.05.01 | Belanja Modal Alat Kantor | 5.247.790.693,00 | 3.465.616.050,00 | (1.782.174.643,00) | (33,96) | |
| 5.2.02.05.02 | Belanja Modal Alat Rumah Tangga | 8.638.172.250,00 | 8.187.776.250,00 | (450.396.000,00) | (5,21) | |
| 5.2.02.05.03 | Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat | 178.771.500,00 | 178.771.500,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5.2.02.06 | Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar | 5.489.830.500,00 | 5.574.280.500,00 | 84.450.000,00 | 1,54 | |
| 5.2.02.06.01 | Belanja Modal Alat Studio | 5.409.168.000,00 | 5.493.618.000,00 | 84.450.000,00 | 1,56 | |
| 5.2.02.06.02 | Belanja Modal Alat Komunikasi | 80.662.500,00 | 80.662.500,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5.2.02.07 | Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan | 63.083.309.050,00 | 54.073.687.552,00 | (9.009.621.498,00) | (14,28) | |
| 5.2.02.07.01 | Belanja Modal Alat Kedokteran | 63.083.309.050,00 | 54.073.687.552,00 | (9.009.621.498,00) | (14,28) | |
| 5.2.02.08 | Belanja Modal Alat Laboratorium | 1.502.185.500,00 | 1.650.458.498,00 | 148.272.998,00 | 9,87 | |
| 5.2.02.08.01 | Belanja Modal Unit Alat Laboratorium | 771.514.000,00 | 919.786.998,00 | 148.272.998,00 | 19,22 | |
| 5.2.02.08.03 | Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah | 730.671.500,00 | 730.671.500,00 | 0,00 | 0,00 | |

| NOMOR URUT | URAIAN | JUMLAH (Rp) | | BERTAMBAH / (BERKURANG) | | DASAR HUKUM |
|--------------|---|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------|-------------|
| | | SEBELUM PERGESERAN | SETELAH PERGESERAN | (Rp) | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 4 - 3 | 6 | 7 |
| 5.2.02.10 | Belanja Modal Komputer | 41.886.957.750,00 | 26.753.420.850,00 | (15.133.536.900,00) | (36,13) | |
| 5.2.02.10.01 | Belanja Modal Komputer Unit | 29.277.449.700,00 | 14.188.374.300,00 | (15.089.075.400,00) | (51,54) | |
| 5.2.02.10.02 | Belanja Modal Peralatan Komputer | 12.609.508.050,00 | 12.565.046.550,00 | (44.461.500,00) | (0,35) | |
| 5.2.02.15 | Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja | 1.098.029.500,00 | 1.098.029.500,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5.2.02.15.02 | Belanja Modal Alat Pelindung | 1.098.029.500,00 | 1.098.029.500,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5.2.02.16 | Belanja Modal Alat Peraga | 0,00 | 6.000.000,00 | 6.000.000,00 | 0,00 | |
| 5.2.02.16.01 | Belanja Modal Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan | 0,00 | 6.000.000,00 | 6.000.000,00 | 0,00 | |
| 5.2.02.18 | Belanja Modal Rambu-Rambu | 829.614.000,00 | 829.614.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5.2.02.18.01 | Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat | 814.457.000,00 | 814.457.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5.2.02.18.02 | Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara | 15.157.000,00 | 15.157.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5.2.02.99 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD | 18.678.190.000,00 | 18.678.190.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5.2.02.99.99 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD | 18.678.190.000,00 | 18.678.190.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5.2.03 | Belanja Modal Gedung dan Bangunan | 71.429.620.314,00 | 62.072.411.314,00 | (9.357.209.000,00) | (13,10) | |
| 5.2.03.01 | Belanja Modal Bangunan Gedung | 64.497.810.314,00 | 55.140.601.314,00 | (9.357.209.000,00) | (14,51) | |
| 5.2.03.01.01 | Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja | 57.237.810.314,00 | 55.140.601.314,00 | (2.097.209.000,00) | (3,66) | |
| 5.2.03.01.02 | Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal | 7.260.000.000,00 | 0,00 | (7.260.000.000,00) | (100,00) | |
| 5.2.03.99 | Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD | 6.931.810.000,00 | 6.931.810.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5.2.03.99.99 | Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD | 6.931.810.000,00 | 6.931.810.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5.2.04 | Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi | 392.411.338.969,00 | 387.798.852.498,00 | (4.612.486.471,00) | (1,18) | |
| 5.2.04.01 | Belanja Modal Jalan dan Jembatan | 334.726.530.351,00 | 332.889.968.504,00 | (1.836.561.847,00) | (0,55) | |
| 5.2.04.01.01 | Belanja Modal Jalan | 318.791.632.851,00 | 316.955.071.004,00 | (1.836.561.847,00) | (0,58) | |
| 5.2.04.01.02 | Belanja Modal Jembatan | 15.934.897.500,00 | 15.934.897.500,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5.2.04.02 | Belanja Modal Bangunan Air | 51.991.878.118,00 | 51.768.123.994,00 | (223.754.124,00) | (0,43) | |
| 5.2.04.02.01 | Belanja Modal Bangunan Air Irigasi | 41.017.379.114,00 | 41.017.379.036,00 | (78,00) | 0,00 | |
| 5.2.04.02.04 | Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam | 10.900.000.000,00 | 10.676.245.954,00 | (223.754.046,00) | (2,05) | |
| 5.2.04.02.07 | Belanja Modal Bangunan Air Kotor | 74.499.004,00 | 74.499.004,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5.2.04.03 | Belanja Modal Instalasi | 3.599.630.500,00 | 1.047.460.000,00 | (2.552.170.500,00) | (70,90) | |
| 5.2.04.03.03 | Belanja Modal Instalasi Pengolahan Sampah | 1.001.120.000,00 | 1.001.120.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5.2.04.03.09 | Belanja Modal Instalasi Pengaman | 2.552.170.500,00 | 0,00 | (2.552.170.500,00) | (100,00) | |
| 5.2.04.03.10 | Belanja Modal Instalasi Lain | 46.340.000,00 | 46.340.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5.2.04.04 | Belanja Modal Jaringan | 3.300.000,00 | 3.300.000,00 | 0,00 | 0,00 | |

| NOMOR URUT | URAIAN | JUMLAH (Rp) | | BERTAMBAH / (BERKURANG) | | DASAR HUKUM |
|--------------|---|--------------------|--------------------|-------------------------|--------|-------------|
| | | SEBELUM PERGESERAN | SETELAH PERGESERAN | (Rp) | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 4 - 3 | 6 | 7 |
| 5.2.04.04.03 | Belanja Modal Jaringan Telepon | 3.300.000,00 | 3.300.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5.2.04.99 | Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Instalasi BLUD | 2.090.000.000,00 | 2.090.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5.2.04.99.99 | Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Instalasi BLUD | 2.090.000.000,00 | 2.090.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5.2.05 | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya | 40.455.366.900,00 | 40.455.366.900,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5.2.05.01 | Belanja Modal Bahan Perpustakaan | 379.000.000,00 | 379.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5.2.05.01.02 | Belanja Modal Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro | 379.000.000,00 | 379.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5.2.05.03 | Belanja Modal Hewan | 1.804.441.500,00 | 1.804.441.500,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5.2.05.03.02 | Belanja Modal Ternak | 1.804.441.500,00 | 1.804.441.500,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5.2.05.05 | Belanja Modal Tanaman | 4.280.000,00 | 4.280.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5.2.05.05.01 | Belanja Modal Tanaman | 4.280.000,00 | 4.280.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5.2.05.08 | Belanja Modal Aset Tidak Berwujud | 625.301.000,00 | 625.301.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5.2.05.08.01 | Belanja Modal Aset Tidak Berwujud | 625.301.000,00 | 625.301.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5.2.05.88 | | 36.142.344.400,00 | 36.142.344.400,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5.2.05.88.88 | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS | 36.142.344.400,00 | 36.142.344.400,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5.2.05.99 | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD | 1.500.000.000,00 | 1.500.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5.2.05.99.99 | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD | 1.500.000.000,00 | 1.500.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5.3 | BELANJA TIDAK TERDUGA | 21.001.385.757,00 | 98.810.565.754,00 | 77.809.179.997,00 | 370,50 | |
| 5.3.01 | Belanja Tidak Terduga | 21.001.385.757,00 | 98.810.565.754,00 | 77.809.179.997,00 | 370,50 | |
| 5.3.01.01 | Belanja Tidak Terduga | 21.001.385.757,00 | 98.810.565.754,00 | 77.809.179.997,00 | 370,50 | |
| 5.3.01.01.01 | Belanja Tidak Terduga | 21.001.385.757,00 | 98.810.565.754,00 | 77.809.179.997,00 | 370,50 | |
| 5.4 | BELANJA TRANSFER | 525.081.658.748,00 | 525.081.658.748,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5.4.01 | Belanja Bagi Hasil | 22.065.196.660,00 | 22.065.196.660,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5.4.01.01 | Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa | 18.268.247.590,00 | 18.268.247.590,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5.4.01.01.03 | Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada | 18.268.247.590,00 | 18.268.247.590,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5.4.01.02 | Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa | 3.796.949.070,00 | 3.796.949.070,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5.4.01.02.01 | Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa | 3.796.949.070,00 | 3.796.949.070,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5.4.02 | Belanja Bantuan Keuangan | 503.016.462.088,00 | 503.016.462.088,00 | 0,00 | 0,00 | |

| NOMOR URUT | URAIAN | JUMLAH (Rp) | | BERTAMBAH / (BERKURANG) | | DASAR HUKUM |
|--------------|--|----------------------|----------------------|-------------------------|------|-------------|
| | | SEBELUM PERGESERAN | SETELAH PERGESERAN | (Rp) | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 4 - 3 | 6 | 7 |
| 5.4.02.02 | Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Kabupaten/Kota | 2.719.193.376,00 | 2.719.193.376,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5.4.02.02.01 | Belanja Bantuan Keuangan Umum antar Daerah Kabupaten/Kota | 2.719.193.376,00 | 2.719.193.376,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5.4.02.03 | Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota | 4.848.742.856,00 | 4.848.742.856,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5.4.02.03.02 | Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota | 4.848.742.856,00 | 4.848.742.856,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5.4.02.05 | Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa | 495.448.525.856,00 | 495.448.525.856,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5.4.02.05.01 | Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa | 495.448.525.856,00 | 495.448.525.856,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | SURPLUS / (DEFISIT) | (740.557.983.922,00) | (740.557.983.922,00) | 0,00 | 0,00 | |
| 6 | PEMBIAYAAN DAERAH | | | | | |
| 6.1 | PENERIMAAN PEMBIAYAAN | 740.557.983.922,00 | 740.557.983.922,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6.1.01 | Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya | 740.557.983.922,00 | 740.557.983.922,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6.1.01.07 | Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan | 740.557.983.922,00 | 740.557.983.922,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6.1.01.07.02 | Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan | 740.557.983.922,00 | 740.557.983.922,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | PEMBIAYAAN NETTO | 740.557.983.922,00 | 740.557.983.922,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

BUPATI JEMBER

ttd

HENDY S

SEKRETARIS DAERAH,

 Ir. MIRFANO
 Pemula Utama Muda
 NIP. 19630215 199202 1 001